

MODAL SOSIAL KOMUNITAS DALAM PEMBANGUNAN SOSIAL

Muhammad Syafar

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

email: m.syafar@uinbanten.ac.id

Abstrak

Pembangunan menjadi gelombang baru dalam mencapai kesejahteraan suatu negara. Istilah pembangunan dimaknai sebagai proses perencanaan untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yang diharapkan hasilnya dapat dibagi-bagi untuk mensejahterakan negaranya. Tulisan ini menguraikan konsep modal sosial sebagai dasar terwujudnya kehidupan sosial di masyarakat dalam mewujudkan pembangunan sosial. Modal sosial menjadi sangat penting dalam penguatan kapasitas masyarakat, khususnya bagi masyarakat Indonesia sebagai Negara berkembang. Tujuan tulisan ini pada dasarnya adalah 1) mengetahui aspek modal sosial komunitas memiliki peranan dalam pembangunan sosial; 2) menjelaskan arah kebijakan sosial yang menggambarkan pemikiran pelaksanaan pembangunan sosial di Indonesia yang bertumpu pada modal sosial komunitas, dan 3) mengetahui tujuan pembangunan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Kesimpulan yang dihasilkan yaitu pembangunan ekonomi dengan pembangunan sosial semestinya sejalan beriringan. Untuk itu, kebijakan yang dibuat dalam mensukseskan pembangunan nasional harus berpihak pada manusianya sebagai pelaku pembangunan, dengan meningkatkan sumberdaya manusianya (SDM) melalui upaya-upaya kesejahteraan sosial. Konsep kapital sosial sangat diperlukan dalam menyusun kebijakan nasional, sebab pertumbuhan suatu negara salah satunya dapat dilihat dari kapital sosialnya.

Kata kunci: Modal Sosial, Pembangunan Sosial & Komunitas.

A. PENDAHULUAN

Sebuah komunitas terbangun karena adanya ikatan sosial di antara warga masyarakat. Di dalam kehidupan masyarakat banyak sekali komunitas yang dibangun atas kesepakatan dan tujuan bersama yang ingin dicapai oleh komunitas tersebut, seperti : komunitas petani, komunitas nelayan, komunitas seni dan budaya, dan sebagainya. Keberadaan komunitas ini didasarkan pada interaksi

antar anggota masyarakat yang muncul dari kepercayaan umum di dalam sebuah masyarakat untuk saling bekerjasama satu sama lain, baik dalam komunitas yang paling kecil maupun komunitas yang lebih besar.

Kerjasama dilandasi oleh rasa saling percaya dalam berkomunitas. Kepercayaan akan terjadi apabila dilandasi oleh kejujuran, keadilan, keterbukaan, saling peduli, saling menghargai, saling menolong di antara anggota komunitas tersebut. Kepercayaan akan muncul ketika semua anggota komunitas itu memiliki ikatan sosial yang kuat yang terbangun dalam sistem sosial apabila di antara anggotanya saling berinteraksi pada waktu yang relatif lama dan mendalam. Menurut Syafar (2016: 5) menjelaskan bahwa sistem sosial yang baik akan terlaksana jika manusia sebagai para pelakunya mencerminkan sikap yang baik. Berjalannya sistem sangat dipengaruhi oleh manusianya sebagai pelaku kehidupan ini, sehingga sangat penting sekali untuk mengkaji perilaku manusia sebagai dasar pembangunan kehidupan yang berkelanjutan dan dinamis.

Kepercayaan merupakan salah satu modal sosial yang penting untuk membangun komunitas, baik untuk komunitas itu sendiri maupun hubungannya dengan komunitas yang lainnya. Dengan demikian, modal sosial menjadi dasar terbangunnya kerjasama di dalam kehidupan masyarakat demi mencapai tujuan bersama dalam pembangunan nasional.

Pembangunan dalam 3 (tiga) dekade belakangan ini menjadi isu yang hangat dibicarakan oleh masyarakat luas. Kehadiran “pembangunan” sebagai wujud dari gerakan modernisasi yang “dinahkodai” oleh negara-negara kapitalis, dengan ditandai munculnya Amerika Serikat sebagai negara adidaya, untuk ikut dalam mempengaruhi kebijakan pembangunan negara-negara didunia ketiga, khususnya negara-negara yang baru merdeka dari penjajahan. Suwarsono dan So (1994 : 7) menjelaskan bahwa modernisasi hadir sebagai salah satu upaya pembendungan ideologi komunisme oleh Uni Soviet, sehingga Amerika Serikat bersama sekutu-sekutunya berusaha memperluas pengaruh politiknya di banyak negara baru

merdeka, seperti Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Negara-negara ini secara serempak mencari model-model pembangunan yang hendak digunakan sebagai contoh untuk membangun ekonominya dan dalam usaha mempercepat pencapaian kemerdekaan politiknya.

Pembangunan menjadi gelombang baru dalam mencapai kesejahteraan suatu negara. Istilah pembangunan dimaknai sebagai proses perencanaan untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yang diharapkan hasilnya dapat dibagi-bagi untuk mensejahterakan negaranya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diukur melalui Pendapatan Nasional Bruto (PNB) suatu negara yang diperoleh dari sebagian kecil sektor, dimana hasilnya secara spontan akan “menetes ke bawah” (*trickle down effect*) kepada sebagian besar sistem atau sektor lainnya. Konsep pembangunan ekonomi ini melahirkan strategi kebijakan pembangunan yang berpusat pada penentu kebijakan saja, dalam hal ini adalah pemerintah yang memiliki kebijakan dalam suatu negara. Untuk itu, pembangunan ekonomi ditentukan melalui strategi dari atas ke bawah (*top down*) yang bertujuan untuk memberikan peluang-peluang ekonomi bagi para pelaku pasar untuk melakukan transaksi ekonomi, juga berpartisipasi untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan meningkatkan pendapatan riil perkapita masyarakat sebagai ukuran pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Pembangunan yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi menuai banyak kritik karena kegagalannya menjawab persoalan kesejahteraan negara. Pembangunan yang semula ditujukan untuk mencapai kemakmuran suatu negara, ternyata menghasilkan kesenjangan kemiskinan yang cukup besar. Kesejahteraan hanya dinikmati oleh sebagian kecil konglomerat (pelaku ekonomi) saja, dan harapan memberi *trickle down effect* belum terbukti. Sumodiningrat (1999 : 4) menjelaskan konsep pembangunan ekonomi baru memandang bahwa permasalahan-permasalahan kemiskinan, pengangguran, dan distribusi pendapatan tidak dapat dituntaskan secara alamiah, dengan hanya mengharapakan “tetesan ke bawah” dari

hasil-hasil pembangunan yang ada. Sebab dalam pembangunan, bukan hanya sekedar memperhatikan pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga mampu meningkatkan pendidikan, memperoleh kesehatan, memiliki pemukiman, dan pengaman sosial bagi masyarakat.

Dengan demikian, dalam pelaksanaan pembangunan tidak semata-mata hanya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga harus memperhatikan aspek sosial, begitu juga sebaliknya. Migdley (2005 : 34) menjelaskan bahwa di dalam proses pembangunan, pembangunan sosial dan ekonomi membentuk dua sisi dari satu mata uang yang sama. Pembangunan sosial tidak akan terjadi tanpa pembangunan ekonomi dan pembangunan ekonomi tidak akan berarti tanpa diiringi dengan peningkatan kesejahteraan sosial pada masyarakat secara menyeluruh. Jadi, dalam upaya untuk mencapai suatu kesejahteraan suatu negara, dibutuhkan konsep dan strategi kebijakan pembangunan sosial dan ekonomi yang berjalan simultan dan berkelanjutan. Modal sosial menjadi aspek penting dalam pembangunan sosial.

Tulisan ini menguraikan konsep modal sosial sebagai dasar terwujudnya kehidupan sosial di masyarakat dalam mewujudkan pembangunan sosial. Modal sosial menjadi sangat penting dalam penguatan kapasitas masyarakat, khususnya bagi masyarakat Indonesia sebagai Negara berkembang. Modal sosial telah diterima secara meluas sebagai perspektif teoritis yang memiliki kekuatan guna memahami norma-norma dan relasi sosial yang bekerja di dalam suatu struktur sosial, dimana modal sosial merupakan dasar bagi pembangunan sosial di sebuah komunitas, dalam arti pembangunan yang melibatkan semua aspek, baik aspek sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang terintegrasi dalam satu satu wadah komunitas dalam masyarakat yang majemuk.

Putnam (1993 : 167) menjelaskan *social capital here refers to features of social organization, such as trust, norms, and networks, that can improve the efficiency of society by facilitating coordinated actions*. Modal sosial sebagai seperangkat nilai-nilai, norma,

dan kepercayaan yang mempermudah masyarakat bekerja sama secara aktif dan terkoordinasi untuk mencapai tujuan-tujuannya. Konsep modal sosial dapat diterapkan pada tingkat individu, kelompok, bahkan Negara. Komunitas dalam masyarakat tersebut membangun modal sosial melalui pengembangan hubungan-hubungan yang aktif, partisipasi demokrasi, penguatan komunitas, dan kepercayaan.

Dari penjelasan di atas, mengasilkan 3 (tiga) rumusan pertanyaan, yaitu : 1). Bagaimana aspek modal sosial komunitas memiliki peranan dalam pembangunan sosial? 2) Bagaimana arah kebijakan sosial yang menggambarkan pemikiran pelaksanaan pembangunan sosial di Indonesia? 3) Bagaimana tujuan pembangunan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan?

Berdasarkan rumusan pertanyaan di atas, tujuan dari tulisan ini menguraikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Mengetahui aspek modal sosial komunitas memiliki peranan dalam pembangunan sosial;
2. Menjelaskan arah kebijakan sosial yang menggambarkan pemikiran pelaksanaan pembangunan sosial di Indonesia yang bertumpu pada modal sosial komunitas, dan;
3. Mengetahui tujuan pembangunan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.

B. PEMBAHASAN

Secara umum modal sosial didefinisikan sebagai informasi, kepercayaan, dan norma-norma timbal-balik yang melekat dalam suatu sistem jaringan sosial (Saharudin, 2000: 20). Dalam konteks kehidupan masyarakat, konsep modal sosial dapat menjelaskan relasi-relasi sosial dan norma-norma yang bekerja dalam suatu struktur sosial untuk melihat perkembangan suatu masyarakat. Modal sosial dapat memungkinkan terciptanya kemakmuran ekonomi yang dikaitkan dengan isu-isu

pembangunan di suatu Negara, terutama Negara-negara berkembang.

Bourdieu (1983/1986) menjelaskan bahwa *sees capital in three guises: as economic capital, as cultural capital, and as social capital. For him, social capital is "made up of social obligations or connections." It is the aggregation of "actual or potential resources which are linked to possession of a durable network of institutionalized relationships of mutual acquaintance and recognition – or in other words, to membership in a group"* (Lin, 2001: 22). Modal sosial melekat dalam suatu komunitas yang tercipta dalam jaringan-jaringan anggota/ kelompok masyarakat dan norma-norma sosial yang bekerja didalamnya dan secara empiris dapat memperlancar koordinasi dan kerja sama untuk memperoleh manfaat yang positif di antara anggota/kelompok masyarakat tersebut.

Konsep komunitas sebagian dari masyarakat merupakan gagasan yang lahir dari pemikiran Barat. Teori masyarakat sipil merujuk pada kelompok masyarakat menengah yang memiliki posisi tawar kuat dengan pemerintah. Menurut O'Donnell and Schmitter mendefinisikan masyarakat sipil *as the network of groups and associations which mediate between individual and the state or political society. Sedangkan Alfred Stepan menjelaskan bahwa 'civil society' I mean that arena where manifold social movements ... and civic organizations from all classes attempt to constitute themselves in an ensemble of arrangements so that they can express themselves and advance their interests* (Burnell & Calvert 2004: 94 dan 95). Masyarakat sipil secara umum sebagai suatu masyarakat yang memiliki ciri-ciri kemandirian, toleransi, dan menjunjung tinggi norma dan etika serta menjunjung tinggi kebebasan berekspresi, berpendapat, dan penuh dengan rasa keadilan dalam membangun kehidupannya dalam arti luas. Masyarakat sipil merupakan dasar kehidupan sosial yang mengedepankan semangat demokrasi dan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam masyarakat sipil, seluruh komponen bangsa bekerjasama membangun ikatan sosial, jaringan produktif, dan solidaritas kemanusiaan yang bersifat keswadayaan untuk mencapai kebaikan dan tujuan bersama. Karena itu,

tekanan sentral masyarakat sipil adalah terletak pada independensinya terhadap Negara dan berpartisipasi penuh dalam mengontrol dan berpartisipasi dalam agenda kebijakan pemerintah.

Disinilah letak hubungannya antara modal sosial dengan masyarakat sipil. Modal sosial yang kuat di masyarakat menciptakan suatu masyarakat yang demokratis, menjunjung tinggi HAM, dan nilai-nilai keadilan. Tocqueville dalam Putman (Ibid: 172) mengatakan “*Democratic government is strengthened, not weakened, when it faces a vigorous civil society.*” Dalam sebuah Negara yang demokratis, pemerintahan yang kuat dan tidak lemah ketika menghadapi masyarakat sipil yang kuat. Masyarakat sipil, melalui berbagai komunitas yang dibentuknya menjadi pengontrol kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat demi mewujudkan keadilan sosial masyarakat itu sendiri.

Peranan Modal Sosial Komunitas dalam Pembangunan Sosial

Dalam perkembangannya, istilah modal sosial mengalami perdebatan dalam berbagai pandangan sosiologis maupun ekonomis. Coleman dalam Dasgupta dan Serageldin (1999: 14) menjelaskan bahwa *the economic stream, on the other hand, flies in the face of empirical reality: persons' actions are shaped, redirected, constrained by the social context; norms, interpersonal trust, social networks, and social organization are important in the functioning not only of the society but also of the economy.* Dalam pandangan sosiologis, menyatakan bahwa modal sosial melihat aktor dan tindakan sosial dikendalikan oleh nilai sosial, aturan, dan jaminan. Modal sosial menjelaskan pola tindakan dibentuk, dihambat, dan dialihkan oleh konteks sosial tersebut. Sedangkan pandangan ekonomis menjelaskan bahwa modal sosial melihat aktor sebagai pemilik tujuan yang dapat mencapai tujuannya secara bebas, keseluruhan yang mendahulukan kepentingan pribadi dalam prinsip memaksimalkan keuntungan.

Berbagai pandangan sosiolog maupun ekonom tentang kapital sosial masih terbatas pada perhatian konsepsinya di bidang masing-masing. Lawang (2005: 9) menjelaskan bahwa kapital dalam bidang ekonomi mempunyai fungsi yang sangat penting dalam proses produksi barang dan jasa, terutama untuk jangka panjang, yang terdiri dari: kapital finansial, kapital manusia, dan kapital fisik. Kapital finansial merupakan simbol dan hak yang terkait dengan kredit dan uang, yang lebih memperlihatkan hubungan sosial dan fungsi penyaluran dan pemerolehan anggaran untuk kegiatan ekonomi yang berfungsi menata kesempatan untuk memperoleh uang. Kapital fisik merupakan kapital yang sengaja dibuat oleh manusia untuk suatu keperluan tertentu dalam proses produksi barang atau jasa, yang memungkinkan orang memperoleh keuntungan pendapatan di masa yang mendatang. Sedangkan kapital manusia menunjuk pada kemampuan yang dimiliki seseorang melalui pendidikan, pelatihan dan atau pengalaman dalam bentuk pengalaman atau keterampilan yang perlu untuk melakukan kegiatan tertentu.

Konsepsi modal sosial terlalu abstrak dan sulit dimengerti jika dikaji dalam menjawab isu-isu ekonomi, terutama dalam pembangunan ekonomi. Ostrom (1992: 172) menganalisa kesulitan itu bersumber dari perbedaannya dengan tiga modal lain dalam ilmu ekonomi, yaitu : (a) *social capital does not wear out with use, but rather with disuse*; (b) *social capital is not easy to observe and measure*; (c) *social capital is hard to construct through external interventions*; and (d) *national and regional governmental institutions strongly affect the level and type of social capital available to individuals to pursue long-term development efforts*. Perbedaan pandangan koseptual mengenai modal sosial merupakan strategi teoritis mempertautkan wacana sosiologis dengan isu-isu ekonomi. Sebab diskursus mengenai kajian perkembangan masyarakat tidak terlepas dari berbagai kajian disiplin ilmu dalam rangka menjelaskan hakekat suatu tindakan sosial di masyarakat. Para ekonom dan bahkan sebagian sosiolog melihat kehadiran modal sosial seperti mengobarkan kembali tradisi fungsionalisme Parson yang oleh kelompok ini (Siregar, 2004: 25).

Bourdieu dalam Lin (Ibid: 22) mampu melihat modal dalam tiga pandangan, yaitu: modal ekonomi, modal budaya, dan sebagai modal sosial. Menurutnya, modal sosial adalah sebagai keseluruhan sumber-sumber aktual atau virtual, yang mengalir dari individu atau kelompok melalui jalur-jalur pemilikan jaringan sementara atau hubungan-hubungan yang kurang terlembaga berupa pertemanan dan pengakuan yang saling menguntungkan. Modal, dalam hal ini direpresentasikan melalui ukuran jaringan dan volume modal (ekonomi, budaya, atau simbolis) yang dimiliki oleh individu atau kelompok yang saling berhubungan tersebut satu sama lain. Dengan demikian, modal sosial merupakan aset kolektif bersama oleh anggota kelompok yang ditetapkan, dengan batas-batas yang jelas, kewajiban pertukaran, dan saling pengakuan antar sesama individu atau kelompok yang saling berhubungan tersebut.

Woolcock dalam Saharudin (Ibid: 21) menggolongkan modal sosial menjadi 4 (empat) tipe utama, yaitu: Pertama, Tipe Ikatan Solidaritas (Bounded Solidarity), dimana modal sosial menciptakan mekanisme kohesi kelompok dalam situasi yang merugikan kelompok. Kedua, Tipe Pertukaran Timbal-Balik (Reciprocity Transaction), yaitu pranata yang melahirkan pertukaran antar pelaku. Ketiga, Tipe Nilai Luhur (Value Introjection), yakni gagasan dan nilai, moral yang luhur, dan komitmen melalui hubungan-hubungan kontraktual dan menyampaikan tujuan-tujuan individu, dibalik tujuan-tujuan instrumental. Keempat, Tipe Membina Kepercayaan (Enforceable Trust), bahwa institusi formal dan kelompok-kelompok partikelir menggunakan mekanisme yang berbeda untuk menjamin pemenuhan kebutuhan berdasarkan kesepakatan terdahulu dengan mekanisme rasional.

Keempat tipe modal sosial tersebut selalu terkait dengan penggunaan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu dan bersifat timbal-balik. Selanjutnya, Portes dalam Saharudin (Ibid: 22) menyatakan bahwa modal sosial memiliki konsekuensi positif dan negatif. Konsekuensi positif berupa sumber pengawasan sosial, sumber dukungan bagi keluarga, dan sumber manfaat ekonomi

melalui jaringan sosial luar. Sedangkan konsekuensi negatif berupa pembatasan peluang bagi pihak lain (eksklusifitas), pembatasan keterbatasan individu, klaim berlebihan atas keanggotaan kelompok, dan penyamarataan nilai kepada anggota (konformitas).

Praktek-praktek dalam pengembangan keuangan mikro di beberapa institusi sosial di pedesaan merupakan contoh dari penerapan modal sosial yang lebih konkrit. Putnam (Ibid: 163) melihat bahwa the Javanese "*arisan*" is commonly viewed by its members less as an economic institution than a broadly social one whose main purpose is the strengthening of community solidarity. Di daerah pedesaan pada umumnya membentuk asosiasi-asosiasi kredit bergulir sebagai suatu lembaga ekonomi sederhana, dimana aturan-aturan mengenai mekanisme pelaksanaannya ditentukan oleh komunitas sendiri, dan inilah mekanisme untuk memperkuat kapasitas sosial ekonomi masyarakat desa dalam bentuk konkrit.

Arisan merupakan komunitas yang dibentuk oleh sekelompok orang yang memiliki kegiatan mengumpulkan uang secara teratur dalam jumlah dan periode tertentu yang hasilnya diberikan kepada anggota kelompok yang dinyatakan sebagai pemenang yang biasanya dilakukan dengan jalan pengundian. Dalam budaya arisan, setiap kali salah satu anggota kelompok dinyatakan sebagai pemenang dalam pengundian, maka pemenang tersebut memiliki kewajiban untuk menggelar pertemuan arisan pada periode berikutnya. Mekanisme di dalam Arisan ditentukan sendiri oleh anggota kelompok dengan mengedepankan prinsip gotong royong, kekeluargaan, kepercayaan, dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut, sehingga mereka mampu bekerja sama untuk mencapai tujuan arisan tersebut, yaitu menguatkan kapasitas sosial dan ekonomi komunitas.

Dalam perkembangannya, Arisan tidak hanya dalam bentuk uang saja. Di beberapa pedesaan di Indonesia, para petani juga melakukan arisan dalam bentuk tenaga ketika menjelang musim panen atau tanam. Petani yang tergabung dalam kelompok-kelompok tani dalam satu desa melakukan arisan tenaga untuk

meringankan pengeluaran biaya-biaya material yang dikeluarkan ketika musim itu datang. Setiap kelompok tani bekerja secara bergiliran menggarap hamparan lahan kelompok tani, dan kelompok tani yang sudah digarap lahannya memberikan sumbangan tenaga yang tidak berbeda. Solidaritas kelompok tani sebagai suatu komunitas kecil tampak melalui aksi-aksi kebersamaan, relasi yang setara, dan saling percaya antar anggota kelompok dengan kelompok tani lainnya. Setiap komunitas ini bekerjasama secara efektif dan efisien untuk memperoleh manfaat ekonomis dalam mengelola lahan pertanian masing-masing.

Pandangan Bourdieu (1983/1986) tentang modal sosial telah nampak dalam Arisan tenaga ini. Di dalam Arisan tenaga ada sejumlah kewajiban sosial yang melekatkan relasi sosial antar komunitas tani dalam bentuk penguatan jaringan, hubungan yang “dilembagakan” dengan baik, dan membina kepercayaan dalam mengelola sumber daya potensial setiap komunitas secara bersama-sama. Dalam Arisan tenaga, terdapat norma-norma dan kepercayaan yang kuat untuk mempermudah komunitas tani bekerjasama secara aktif dan terkoordinasi untuk mencapai tujuan-tujuannya.

Arisan menggambarkan gerakan masyarakat sipil dalam level mikro. Dalam konteks masyarakat sipil, Arisan merupakan suatu aktivitas masyarakat yang memiliki cirri-ciri kemandirian, toleransi, kerjasama, dan menjunjung tinggi nilai dan etika, serta menjunjung tinggi kebebasan berkumpul, berekspresi, berpendapat, dan penuh dengan rasa keadilan dalam membangun kehidupannya dalam arti luas. Arisan bisa menjadi suatu fokus aktivitas masyarakat yang lebih luas sebagai suatu gerakan “institusi” yang jika diterapkan dengan baik, maka gerakan ini akan mampu melakukan sebuah perubahan sosial di masyarakat. Gerakan yang dilakukan oleh Muhammad Yunus melalui Grameen Bank di Bangladesh, ternyata mampu melakukan perubahan sosial yang besar pada masyarakat miskin dan gerakan ini mampu mempengaruhi kebijakan Negara bahkan dunia Internasional yang harus berpihak kepada rakyat miskin.

Hasil penelitian Syafar (2006: 68) menyatakan bahwa penerapan program *micro finance* (UPK Ikhtiar) di Desa Ciaruteun yang merupakan daerah agribisnis sayuran sangat efektif. Pemberdayaan ekonomi ini bertujuan untuk membangun kapasitas sosial dan kapasitas ekonomi keluarga berpenghasilan rendah agar mereka mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan perumahan, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya melalui pengelolaan asset ekonomi rumah tangga dan pengembangan kewirausahaan. Sehingga solidaritas dan kohesivitas sosial antar anggota terbangun untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.

Gerakan masyarakat sipil pada awalnya dilakukan pada ruang lingkup gerakan yang lebih lokal. Gerakan ini memiliki slogan: "Berpikir global, Bertindak Lokal" sebagai suatu upaya-upaya gerakan akar rumput dalam memprioritaskan pengembangan masyarakat sipil yang berorientasi pada komunitas tertentu dimana seluruh masyarakat disatukan melalui modal sosial. Fokus gerakan masyarakat sipil ini lebih menekankan pada isu-isu dan kepentingan spesifik komunitas, seperti masyarakat adat, petani miskin dan buruh tani, kaum buruh, dan sebagainya.

Kerja-kerja yang dilakukan dalam masyarakat sipil melalui kerjasama membangun ikatan sosial, jaringan produktif, dan solidaritas kemanusiaan yang bersifat keswadayaan untuk mencapai tujuan bersama komunitas. Modal sosial menjadi sangat penting karena dasar dari penguatan masyarakat sipil. Melalui Modal sosial yang kuat, maka tercipta suatu masyarakat sipil yang demokratis, menjunjung tinggi HAM, dan nilai-nilai keadilan. Tocqueville mengatakan "Democratic government is strengthened, not weakened, when it faces a vigorous civil society." Dalam sebuah Negara yang demokratis, pemerintahan yang kuat dan tidak lemah ketika menghadapi masyarakat sipil yang kuat. Masyarakat sipil, melalui berbagai komunitas yang dibentuknya menjadi pengontrol kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat demi mewujudkan keadilan sosial masyarakat itu sendiri.

Arah kebijakan sosial yang menggambarkan pemikiran pelaksanaan pembangunan sosial di Indonesia yang bertumpu pada modal sosial komunitas.

Kebijakan sosial merupakan suatu intervensi kolektif dalam perekonomian untuk memberikan akses sosial kepada masyarakat. Akses sosial tersebut antara lain; jaminan kesehatan, pelayanan dan rehabilitasi sosial, peluang-peluang ekonomi, dan program-program sosial lainnya. Krisis ekonomi tahun 1997/1998 yang melanda Indonesia, telah mengakibatkan krisis multi dimensi, baik sosial, politik, dan budaya. Ketika itu Indonesia sedang berada pada tahapan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) VI yang memprioritaskan pembangunan Lepas Landas. Namun Repelita IV gagal terlaksana akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan, negara tidak mampu mengatasi krisis ekonomi dengan cepat yang mengakibatkan terjadinya kerusuhan sosial di Bulan Mei 1998. Pada saat itulah, telah terjadi perpindahan kekuasaan pemerintahan dari orde baru ke orde reformasi, dengan presidennya adalah B.J. Habibie.

Mengingat krisis multi dimensi yang melanda Indonesia, Presiden B.J. Habibie mengeluarkan kebijakan sosial dalam rangka mengatasi masalah bangsa yang diakibatkan krisis ekonomi. Melalui Keputusan Presiden Nomor 190 Tahun 1998 tentang Pembentukan Gugus Tugas Peningkatan Jaring Pengaman Sosial (JPS), atas dasar pertimbangan bahwa dalam upaya mengatasi situasi yang timbul akibat krisis moneter yang berlangsung saat ini, Jaring Pengaman Sosial (JPS) sangat penting artinya dalam mendukung dan mewujudkan proses pemberdayaan masyarakat. Program JPS Sebagai kebijakan sosial yang paling nyata dilihat sebagai wujud melaksanakan pembangunan sosial.

Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) atau *Social Safety Net* merupakan langkah darurat, pertolongan gawat darurat, yang dirancang oleh IMF, bersama pemerintah, setelah melihat betapa rusaknya kondisi sosial ekonomi bangsa Indonesia akibat krisis yang melanda sejak pertengahan tahun 1997. Indikasi kerusakan itu terlihat pada jumlah penduduk miskin dan pengangguran yang

membengkak dalam waktu yang relatif singkat. Program JPS Memiliki fokus pada pemberdayaan masyarakat. Bank Dunia dalam Sumodiningrat (1999: 122) menyebutkan bahwa program JPS ditujukan untuk melindungi kelompok orang atau keluarga yang mengalami penurunan kapasitas secara kronis sehingga kehilangan pekerjaan dan pendapatan tetap (chronic poverty) dan kelompok orang atau keluarga yang mengalami penurunan dari garis marjinal kemiskinan sehingga tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup (transient poverty). Melalui program JPS, masyarakat memperoleh pemberdayaan dari pemerintah.

Dalam menjalankan tujuan-tujuan program JPS tersebut, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 17,996 trilyun yang sebagian besar dari pinjaman luar negeri (terutama IMF dan Bank Dunia). Dalam Laporan Akhir Kajian terhadap Implementasi Program JPS (2000: 3) menyebutkan bahwa program JPS dibagi menjadi 4 (empat) kelompok program, yaitu: 1) Keamanan pangan, 2) Perlindungan sosial yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, 3) Penciptaan kesempatan kerja, 4) Ekonomi kerakyatan. Semua sektor pembangunan menjadi target program JPS yang diharapkan mampu mengatasi persoalan kemiskinan masyarakat akibat krisis moneter. Kebijakan sosial melalui program JPS ini merupakan langkah nyata memberdayakan masyarakat dari krisis ekonomi yang berkepanjangan.

Pada dasarnya, kebijakan sosial yang dibuat oleh pemerintah (orde lama sampai orde reformasi) bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan masyarakat. Kemiskinan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya struktural dan kultural. Keberadaan program JPS dalam memberdayakan masyarakat dipengaruhi oleh faktor struktural, artinya masyarakat menjadi miskin karena; kehilangan pekerjaan, kekurangan pangan, tidak mampu sekolah dan berobat, diakibatkan oleh kebijakan dalam pembangunan yang salah. Hal ini disebabkan oleh pembangunan nasional hanya mengedepankan pembangunan ekonomi sehingga ketika ekonomi dunia mengalami penurunan (resesi), Indonesia terkena

dampaknya. Sayangnya lagi, kebijakan sosial di Indonesia kurang mendapat perhatian, dan mengakibatkan krisis multi dimensi yang cukup hebat sampai ke daerah-daerah di Indonesia. Inilah pelajaran bagi bangsa Indonesia, ternyata mendistorsikan kebijakan sosial berakibat pada pengalaman sejarah yang pahit dan kelam, Indonesia kurang berpengalaman dalam mengatasi masalah sosial akibat kebijakan ekonomi yang pernah mengguncang negara ini.

Untuk itu, kebijakan sosial yang diberlakukan perlu mengedepankan manusia sebagai subyek pembangunan dengan didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan. Pembangunan sosial yang didasarkan pada nilai kemanusiaan berimplikasi terhadap mewujudnya pembangunan yang bermartabat menuju keadilan sosial yang sesungguhnya. Wirutomo (2010: 14) dalam pidato ilmiahnya menjelaskan bahwa pembangunan berbasis nilai adalah suatu pembangunan seluruh aspek kehidupan bangsa (ekonomi, politik, sosial, dan budaya) yang dilandasi oleh nilai tertentu¹. Dengan demikian, pencapaian hasil dari pembangunan bukan hanya pada pertumbuhan ekonomi saja, melainkan stabilitas politik, penanaman nilai-nilai budaya bangsa yang tinggi, dan juga kesejahteraan sosial bagi masyarakat.

Kebijakan sosial bertujuan untuk mencapai kesejahteraan sosial dengan mengubungkannya pada proses pembangunan ekonomi yang dinamis dan bertumpu pada aspek sosial kemanusiaan, yaitu modal sosial masyarakat. Dalam merealisasikan kebijakan sosial yang komprehensif dan universal, dibutuhkan suatu kebijakan sosial yang dapat menjadi arahan dan juga kebutuhan bagi pelaksanaan usaha-usaha kesejahteraan sosial. Kebijakan sosial tersebut dibuat dengan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan yang bertujuan sebagai kontrol bagi setiap pelaku pembangunan dalam menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Sehingga keberhasilan dalam menjalankan upaya kesejahteraan sosial, tidak hanya berdasarkan ukuran kuantitatif saja, tetapi juga berlandaskan pada penanaman nilai-nilai untuk mewujudkan pembangunan.

¹ Dipresentasikan dalam rangka Pidato Ilmiah pada Acara “Dies Natalis FISIP-UI Tahnun 2010

Agenda Pembangunan Sosial untuk Meningkatkan Kesejahteraan Sosial.

Dalam pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa pelaksanaan pembangunan perlu memperhatikan pembangunan sosial sebagai strategi untuk mensukseskan pembangunan nasional. Pengalaman dari kegagalan negara mengesampingkan pembangunan sosial telah membuktikan betapa sulitnya membangun masyarakat yang berkeadilan sosial sesuai cita-cita bangsa. Indonesia masih dikatakan belum berhasil mencapai pembangunan nasional yang seutuhnya, jika dibandingkan dengan negara-negara Asia tenggara lainnya dalam menghadapi krisis ekonomi yang lalu. Sebab dampak krisis masih terasa sampai sekarang, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya.

Ketertinggalan Indonesia dengan negara lain dapat dibuktikan dengan masih minimnya pengalaman negara menyelesaikan masalah-masalah sosial hampir di semua sektor. Peristiwa 1965/1966 dan Mei 1998 merupakan bukti nyata sejarah bangsa bahwa kedua peristiwa ini belum diselesaikan dengan baik, di mana nasib para korban dan keluarganya menanggung beban psikologis yang berat ditambah lagi dengan dampak sosial yang dihadapi sebagai warga negara. Negara selalu melupakan kedua peristiwa yang dahsyat tersebut dan cenderung melupakan daripada menyelesaikannya. Ini adalah hutang sejarah yang belum terselesaikan, dan menjadi pekerjaan rumah (PR). Bangsa ini tidak maju jika dalam menyelesaikan masalah sosial (contoh: kedua peristiwa tersebut) tidak mampu, dan bagaimana jika di masa depan terjadi masalah-masalah sosial seperti ini lagi. Untuk itu, pembangunan sosial menjadi salah satu aspek yang penting dalam melaksanakan upaya-upaya kesejahteraan sosial.

Pembangunan sosial lebih memfokuskan diri pada masyarakat yang lebih luas. Tidak seperti pendekatan-pendekatan kesejahteraan sosial lainnya (seperti filantropi, pelayanan dan intervensi sosial, dan administrasi sosial), tetapi pembangunan sosial berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih luas. Program-program sosial ekonomi seperti JPS dan Inpres Desa Tertinggal

(IDT) merupakan bagian dari pembangunan sosial yang menyentuh semua warga negara dalam rangka menanggulangi kemiskinan di pedesaan maupun dipertanian yang di dalamnya terdapat upaya-upaya kesejahteraan.

Program IDT merupakan program yang dirancang oleh pemerintah sebagai proses pembangunan Indonesia menuju tahap lepas landas dalam Repelita VI. Seiring dengan itu, pemerintah membuat kebijakan untuk memberdayakan masyarakat miskin di perkotaan maupun di pedesaan dalam menguatkan kapasitas sosial ekonominya. Komunitas di pedesaan maupun perkotaan yang masuk dalam kategori tidak mampu (miskin) mendapatkan bantuan permodalan dari pemerintah sebagai modal untuk mengembangkan usaha sesuai bidang pekerjaan yang digelutinya. Pemerintah juga menyediakan pendamping bagi masyarakat yang menjadi kelompok sasaran program IDT, yang bertugas mendampingi dan ikut dalam proses belajar bersama masyarakat. Kehadiran para pendamping menjadi orang yang bisa mengarahkan kelompok sasaran untuk bisa mempergunakan bantuan dari pemerintah tersebut dapat digunakan sesuai dengan kebutuhannya dan tepat sasaran. Para pendamping juga memberikan pelatihan-pelatihan dalam rangka meningkatkan sumberdaya manusia sesuai dengan bidang yang digelutinya, pelatihan budi daya tanaman, peningkatan manajemen industri kecil dan menengah, dan sebagainya. Yang lebih penting lagi adalah pendamping bisa berintegrasi sosial dengan masyarakat dalam mewujudkan kehidupan sosial, sehingga program IDT mampu menguatkan kapasitas sosial ekonomi masyarakat.

Program IDT bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara secara keseluruhan. Program IDT menyentuh aspek ekonomi dan sosial kelompok sasaran yang bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat, terutama bagi yang tidak mampu (miskin). Melalui pendekatan intervensi sosial, pelayanan sosial, dan kebijakan sosial yang berpihak pada masyarakat tidak mampu, program IDT dijalankan dalam rangka mensukseskan pembangunan sosial yang sejalan dengan pembangunan ekonomi dalam lingkup pembangunan nasional. Sebagai

tujuannya adalah menanggulangi kemiskinan dalam mencapai kesejahteraan sosial sesuai dengan amanah UUD 1945 dan Pancasila.

C. KESIMPULAN

Pembangunan identik dengan modernisasi yang membuat negara-negara dunia ketiga harus masuk dalam sistem dunia dengan menjadikan negara-negara dunia pertama sebagai porosnya. Indonesia masuk dalam lingkaran modernisasi, dan yang dilakukan selama ini adalah menjadikan pembangunan sebagai kemajuan negara. Untuk itu, dalam pembahasan sebelumnya dapat menarik kesimpulan:

1. Pembangunan ekonomi dengan pembangunan sosial semestinya sejalan beriringan. Untuk itu, kebijakan yang dibuat dalam mensukseskan pembangunan nasional harus berpihak pada manusianya sebagai pelaku pembangunan, dengan meningkatkan sumberdaya manusianya (SDM) melalui upaya-upaya kesejahteraan sosial. Konsep kapital sosial sangat diperlukan dalam menyusun kebijakan nasional, sebab pertumbuhan suatu negara salah satunya dapat dilihat dari kapital sosialnya.
2. Pada dasarnya, kebijakan sosial yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan. Keberadaan program JPS dalam memberdayakan masyarakat dipengaruhi faktor kebijakan yang tidak tepat. Hal ini disebabkan oleh pembangunan nasional hanya mengedepankan pembangunan ekonomi sehingga ketika ekonomi dunia mengalami penurunan (resesi), Indonesia terkena dampaknya, dan mengakibatkan krisis multi dimensi yang cukup hebat sampai ke daerah-daerah di Indonesia.
3. Pembangunan sosial lebih memfokuskan diri pada masyarakat yang lebih luas. Pembangunan sosial berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan sosial semua warga negaranya. Program-program sosial ekonomi seperti JPS dan Inpres Desa Tertinggal (IDT) merupakan bagian dari

pembangunan sosial yang menyentuh semua warga negara dalam menanggulangi kemiskinan di pedesaan maupun diperkotaan yang di dalamnya terdapat upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Burnell, Peter and Peter Calvert. (2004). *Civil Society in Democratization*. Frank Cass and Company Limited. London.
- Coleman, James S. (1998). *Social Capital in the Creation of Human Capital*. (Partha Dasgupta Ismail Serageldin. edited). 1999. *Social Capital A Multifaceted Perspective*. The World Bank. Washington, DC. USA.
- Lawang, Robert M. Z. (2005). *Kapital Sosial dalam Perspektif Sosiologik; Suatu Pengantar*. Fisip UI Press.
- Lin, Nan. (2001). *Social Capital: A Theory of Social Structure and Action*. Cambridge University Press.
- Ostrom, Elinor. (1999). *Social capital: a fad or a fundamental concept?* (Partha Dasgupta Ismail Serageldin. edited). 1999. *Social Capital A Multifaceted Perspective*. The World Bank. Washington, DC. USA.
- Putnam, Robert D. (1993). *Making democracy work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton University Press. New Jersey: USA.
- Saharudin. (2000). *Modal Sosial Organisasi Akar Rumput: Suatu Studi atas lembaga Kesehatan Lokal di Kabupaten Bogor, Jawa Barat*. Tesis pada Program Magister Sosiologi - FISIP Universitas Indonesia.
- Siregar, Budi Baik. (2004). *Modal Sosial Komunitas Perladangan: Kasus Komunitas Kanarakan, Kecamatan Bukit Batu, dan Kota Palangkaraya*. Tesis pada Program Pascasarjana Sosiologi Pedesaan - Institut Pertanian Bogor.
- Sumodiningrat, Gunawan. (1999). *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Syafar, Muhammad. 2006. "Analisis Efektivitas Pembiayaan Sistem Syariah Terhadap Petani Agribisnis Sayuran Pada Program UPK Ikhtiar Yayasan Peramu Bogor (Studi Kasus: Petani Sayuran Desa Ciaruteun Ilir Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor)." IPB. Retrieved (<http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/10444>).
- Syafar, Muhammad. 2016. "Memahami Penerapan Dan Manfaat Teori Sistem, Life-Span, Interaksi Simbolis, Pertukaran Sosial Pada Masalah Sosial." *Lembaran Masyarakat* 2(1):1-28. Retrieved (<http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/lembaran/article/view/479/415>).

Laporan Akhir. (2000). *Kajian Terhadap Implementasi Program JPS (Buku II: Program JPS BK)*. Kerjasama: Lembaga Demografi FE-UI dengan Tim Pengendali Gusus Tugas Peningkatan JPS. Depok.

